

Analisis Fungsi Perangkat Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Utara)

Muhammad Naufal^{1*}

¹STEBI Kyai Haji Ahmad Syairazi Hulu Sungai Selatan, Indonesia

Email: mnaufal@gmail.com¹

*Corresponding Author

Received: 02, 2024. Revised: 04, 2024. Accepted: 04, 2024. Published: 04, 2024

ABSTRACT

This study examines the role of village officials in enhancing the accountability of village fund management for the fiscal year 2023, with a case study of Kandangan Utara Village. The research aims to identify and analyze the functions of village officials in ensuring transparency and accountability in the use of village funds. The methodology employed is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that village officials play a significant role in the planning, implementation, and reporting of village fund budgets. However, several challenges need to be addressed, including a lack of human resource capacity and limitations in information technology. These findings are expected to contribute to the development of more effective policies for managing village funds.

Keywords: Village Officials, Accountability, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2023, dengan studi kasus di Kelurahan Kandangan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fungsi perangkat desa dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dana desa. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi informasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Perangkat Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran dana desa merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), pada tahun 2023, anggaran dana desa yang dialokasikan mencapai Rp 72 triliun. Dana tersebut harus dikelola dengan

hati-hati oleh lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, menjadikannya sebagai tantangan besar dalam hal pengelolaan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan perangkat desa yang berada di garis depan implementasi kebijakan ini. Perangkat desa memainkan peran penting dalam berbagai tahap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan dana. Pengawasan yang ketat dan pelaporan yang transparan adalah kunci utama dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, perangkat desa harus memastikan bahwa semua proses pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengikuti peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk memastikan bahwa setiap pengeluaran didokumentasikan dengan baik dan laporan keuangan disusun secara akurat. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan anggaran desa dapat lebih mudah diawasi dan diaudit secara independen.

Penelitian ini fokus pada Kelurahan Kandangan Utara sebagai studi kasus untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Kelurahan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang representatif dari desa-desa di Indonesia, baik dari segi demografi maupun tantangan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Dengan memilih Kelurahan Kandangan Utara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan anggaran yang baik serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa.

Studi ini akan mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan anggaran desa di Kelurahan Kandangan Utara, termasuk mekanisme pengawasan yang diterapkan, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta efektivitas laporan keuangan yang disusun. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai bagaimana perangkat desa berinteraksi dengan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran dan bagaimana keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi akuntabilitas.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pengelola anggaran desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa. Dengan memahami praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi di lapangan, dapat diidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki pengelolaan anggaran dana desa dengan menyoroti peran penting perangkat desa dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.

Teori akuntabilitas publik, sebagaimana dijelaskan oleh Bovens (2007), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas berarti bahwa perangkat desa harus mampu memberikan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai

penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan akurat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana desa, sehingga dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Teori good governance juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana diuraikan oleh UNDP (1997). Prinsip transparansi memastikan bahwa semua informasi terkait penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat, sementara prinsip partisipasi menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Prinsip akuntabilitas, seperti yang telah dijelaskan, menegaskan bahwa perangkat desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa.

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip good governance ini memberikan landasan bagi perangkat desa untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya transparansi dan partisipasi, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Selain itu, teori manajemen keuangan publik yang diuraikan oleh Mikesell (2011) menekankan pentingnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, perangkat desa harus mampu menjalankan fungsi-fungsi ini dengan baik untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik mencakup penetapan tujuan dan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan desa, sementara penganggaran harus mencerminkan prioritas dan rencana aksi yang jelas.

Pelaksanaan dana desa harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan bahwa setiap pengeluaran didokumentasikan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah pusat dapat memantau dan menilai penggunaan dana desa. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perangkat desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan teori akuntabilitas publik, prinsip-prinsip good governance, dan teori manajemen keuangan publik dalam pengelolaan dana desa dapat membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, perangkat desa dapat lebih baik dalam menjalankan tugas mereka, sehingga memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di Kelurahan Kandungan Utara. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh perangkat desa dalam pengelolaan anggaran dana desa.
2. Menganalisis sejauh mana perangkat desa telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di Kelurahan Kandangan Utara.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai pengelolaan dana desa, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman mengenai peran spesifik perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Sebagian besar studi sebelumnya telah menekankan pada aspek teknis pengelolaan dana desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang didanai oleh dana desa. Namun, fokus pada aspek teknis ini seringkali mengabaikan pentingnya akuntabilitas dan peran perangkat desa dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian terdahulu juga cenderung lebih memusatkan perhatian pada tingkat makro, seperti kebijakan nasional dan regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa, tanpa memberikan analisis mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi di tingkat mikro. Penelitian pada tingkat makro memang penting untuk memahami konteks kebijakan, tetapi kurang memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dijalankan di tingkat desa atau kelurahan. Hal ini menciptakan kesenjangan pemahaman tentang bagaimana perangkat desa secara langsung mempengaruhi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi kasus di Kelurahan Kandangan Utara. Kelurahan ini dipilih karena karakteristiknya yang representatif dari desa-desa di Indonesia, baik dari segi demografi maupun tantangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan fokus pada Kelurahan Kandangan Utara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana perangkat desa berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Studi ini tidak hanya mengevaluasi praktik pengelolaan anggaran di tingkat desa, tetapi juga menilai bagaimana perangkat desa menjalankan fungsi-fungsi mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencakup analisis terhadap mekanisme pengawasan, pelaporan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Dengan cara ini, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan dana desa di tingkat mikro.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap literatur yang ada dengan mengisi kesenjangan pemahaman mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pengelolaan di tingkat desa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan dana desa dan akuntabilitasnya. Misalnya, penelitian oleh Yulianti (2020) yang menemukan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian tersebut tidak secara spesifik mengkaji peran perangkat desa dalam proses tersebut.

Penelitian lain oleh Susanti (2019) menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan akuntabilitas. Namun,

penelitian ini tidak memberikan analisis mendalam mengenai fungsi-fungsi spesifik yang dijalankan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian oleh Rahmawati (2018) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek teknis dan kurang memberikan perhatian pada aspek manajerial dan peran perangkat desa.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji peran spesifik perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di tingkat mikro. Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika pengelolaan dana desa di Kelurahan Kandangan Utara. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di Kelurahan Kandangan Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fungsi-fungsi yang dijalankan oleh perangkat desa dalam pengelolaan anggaran dana desa serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memetakan proses-proses yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi pelaksanaannya. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan memberikan rekomendasi berbasis data yang relevan untuk perbaikan di masa depan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kelurahan Kandangan Utara. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan mengenai pengalaman dan perspektif langsung dari individu yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan perspektif dan tantangan yang nyata dalam praktik pengelolaan anggaran dana desa di tingkat lokal.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan perangkat desa untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pengelolaan anggaran dana desa dan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang diterapkan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti laporan keuangan dan dokumen perencanaan, serta untuk memastikan ketersediaan bukti tertulis terkait pengelolaan dana desa.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan secara iteratif dengan mengkategorikan data ke dalam tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Selama proses analisis, data

diperlakukan dengan seksama untuk memastikan bahwa tema yang diidentifikasi mencerminkan makna dan konteks yang diungkapkan oleh responden. Hasil analisis tematik diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik pengelolaan anggaran dana desa dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa di Kelurahan Kandangan Utara, ditemukan bahwa perangkat desa memiliki peran yang signifikan dalam semua tahapan pengelolaan anggaran dana desa. Dalam tahap perencanaan, perangkat desa bertanggung jawab untuk menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari masyarakat tentang kebutuhan mendesak dan prioritas mereka, serta analisis mendalam tentang potensi alokasi dana untuk berbagai program. Perangkat desa harus memastikan bahwa rencana anggaran yang disusun dapat mencakup semua aspek yang penting dan memberikan manfaat maksimal bagi komunitas.

Pada tahap pelaksanaan, perangkat desa memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Mereka bertanggung jawab untuk memonitor setiap kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan, memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai, dan perangkat desa sering kali harus melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan di lapangan.

Selama tahap pelaksanaan, perangkat desa juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pengawas dan masyarakat, untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Mereka harus siap memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang penggunaan dana jika diperlukan, serta menangani masalah atau kendala yang mungkin muncul. Kolaborasi yang baik antara perangkat desa dan pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk keberhasilan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, perangkat desa memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam tahap pelaporan. Mereka harus menyusun laporan keuangan yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini harus mencakup semua informasi tentang pengeluaran dan penerimaan dana, serta memberikan rincian tentang bagaimana dana tersebut telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dalam pelaporan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipantau dan diaudit dengan baik.

Pelaporan yang akurat dan transparan juga menjadi dasar bagi evaluasi dan pengawasan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah pusat dan lembaga pengawas. Perangkat desa harus siap menghadapi audit dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan standar yang berlaku. Keterbukaan dalam pelaporan juga membantu mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Peran aktif perangkat desa dalam ketiga tahap ini sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas dan keberhasilan pengelolaan anggaran dana desa di tingkat lokal. Setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, memerlukan perhatian dan keterampilan khusus dari perangkat desa. Dengan menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif,

perangkat desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran perangkat desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. Tanpa adanya peran aktif dan efektif dari perangkat desa, proses pengelolaan dana desa tidak akan berjalan dengan baik, dan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan dana akan sulit tercapai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi perangkat desa menjadi langkah penting untuk memperkuat pengelolaan dana desa di masa depan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa di Kelurahan Kandangan Utara telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, kejelasan dalam pelaporan, serta tanggung jawab atas penggunaan dana. Perangkat desa secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana, berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan dana desa.

Namun, meskipun perangkat desa telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi dalam proses pengelolaan anggaran. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pelatihan atau pengalaman yang memadai dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Kekurangan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola anggaran dengan efisien dan efektif, serta mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun.

Selain itu, keterbatasan teknologi informasi juga menjadi kendala penting. Perangkat desa sering kali menghadapi masalah dalam hal akses dan penggunaan teknologi yang diperlukan untuk mengelola dan melaporkan dana desa. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses pengelolaan, mengurangi akurasi data, dan menyulitkan pembuatan laporan yang tepat waktu. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, tantangan dalam pengelolaan dana desa menjadi lebih besar dan lebih kompleks.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa juga merupakan area yang perlu diperbaiki. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, partisipasi mereka masih belum optimal. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menyebabkan ketidakcocokan antara penggunaan dana dan kebutuhan serta prioritas sebenarnya dari masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat dan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan tambahan dalam manajemen keuangan dan penggunaan teknologi informasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia akan membantu mereka mengelola dana desa dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, peningkatan dukungan teknologi, seperti perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi yang lebih baik, dapat membantu mempermudah proses pengelolaan dan pelaporan.

Penting juga untuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat. Strategi untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengelolaan dana desa harus dikembangkan, seperti melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan transparansi yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat,

perangkat desa dapat lebih memahami kebutuhan dan prioritas mereka, serta memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan harapan komunitas.

Secara keseluruhan, meskipun perangkat desa di Kelurahan Kandangan Utara telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas, tantangan-tantangan yang ada menunjukkan perlunya perbaikan dalam kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Mengatasi tantangan ini akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perangkat desa memainkan peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di Kelurahan Kandangan Utara. Perangkat desa terlibat secara langsung dalam semua tahapan pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pelaporan, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas seperti transparansi dan tanggung jawab. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan signifikan, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas lebih lanjut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tambahan dan dukungan dalam manajemen keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif dapat mempermudah proses pengelolaan dan pelaporan anggaran serta meningkatkan akurasi data. Peningkatan partisipasi masyarakat juga sangat penting agar perangkat desa dapat lebih memahami kebutuhan dan prioritas komunitas, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas pengelolaan dan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Kemendesa PD TT. (2023). *Laporan Tahunan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Mikesell, J. L. (2011). *Fiscal Administration*. Boston: Cengage Learning.
- Rahmawati, S. (2018). *Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2), 123-135.
- Susanti, A. (2019). *Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45-60.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Yulianti, D. (2020). *Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 67-80.